

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI
DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL

I. Latar Belakang

Kebijakan dan strategi BKKBN dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kependudukan salah satunya adalah melalui pendidikan kependudukan, baik jalur formal, nonformal dan informal. Strategi yang efektif dan tepat sasaran dalam menerapkan pendidikan kependudukan kepada masyarakat diperlukan dalam setiap jalur penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan karakteristik sasaran target masyarakat. Strategi implementasi melalui jalur formal adalah dengan melembagakan pendidikan kependudukan dalam institusi sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, melalui mekanisme pengintegrasian dalam mata pelajaran/mata kuliah, kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan, kegiatan penelitian dan perpustakaan kependudukan (Pojok Kependudukan).

Strategi branding di sekolah adalah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), di perguruan tinggi adalah Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK). Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Disamping itu juga penerapan pendidikan kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling. SSK ini didukung dengan Pojok Kependudukan (Population Corner) sebagai salah satu sumber dan bacaan belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan karakter generasi berencana. Prinsip Dasar dari Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) antara lain :

1. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini juga merupakan strategi dalam memberikan informasi manfaat dan dampak akan kependudukan melalui integrasi mata pelajaran, kegiatan kesiswaan, bimbingan konseling dan kegiatan yang relevan lainnya.
2. Sekolah Siaga Kependudukan, mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan dan bukan merupakan mata pelajaran baru, sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Namun dengan adanya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ini diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas, atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sekolah Siaga Kependudukan, konsisten dilaksanakan selama mata pelajaran tersebut dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum.

II. Tujuan

Maksud dan tujuan Fasilitasi dan Pembinaan teknis Sekolah Siaga Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Siswa/Siswi dan Guru di lingkungan Sekolah memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan.
2. Siswa/Siswi dan Guru di lingkungan Sekolah memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat.
3. Siswa/Siswi dan Guru di lingkungan Sekolah mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik atau digital untuk dianalisa sederhana.
4. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan.

III. Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Sekolah Siaga Kependudukan akan dilaksanakan di satu (1) Sekolah yang ada di Kota Palangka Raya dan dilaksanakan 2 (dua) hari kegiatan pada tahun 2025 .

IV. Peserta Kegiatan

Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Sekolah Siaga Kependudukan diikuti oleh peserta sebagai berikut :

No.	Peserta	Jumlah
1.	Kepala Sekolah / Wakasek	14 Orang
2.	Guru BP pada di lingkungan sekolah sasaran SSK	14 Orang
3.	Siswa/Siswi di lingkungan sekolah sasaran SSK	28 Orang
4.	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	4 Orang
Jumlah		60 Orang

V. Pembiayaan

Segala pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal dilaksanakan dengan biaya APBD Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025

VI. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar/ panduan pelaksanaan Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Tahun 2025 tingkat Kota Palangka Raya

Palangka Raya, 16 Januari 2025

Mengetahui :
Kabid Pengendalian Penduduk

Analisis Kebijakan,

JOICE VIVIAN, SE

AGUSTONI M. NGUTUS , SE

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI
DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL

VII. Latar Belakang

Kebijakan dan strategi BKKBN dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kependudukan salah satunya adalah melalui pendidikan kependudukan, baik jalur formal, nonformal dan informal. Strategi yang efektif dan tepat sasaran dalam menerapkan pendidikan kependudukan kepada masyarakat diperlukan dalam setiap jalur penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan karakteristik sasaran target masyarakat. Strategi implementasi melalui jalur formal adalah dengan melembagakan pendidikan kependudukan dalam institusi sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, melalui mekanisme pengintegrasian dalam mata pelajaran/mata kuliah, kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan, kegiatan penelitian dan perpustakaan kependudukan (Pojok Kependudukan).

Strategi branding di sekolah adalah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), di perguruan tinggi adalah Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK). Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Disamping itu juga penerapan pendidikan kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling. SSK ini didukung dengan Pojok Kependudukan (Population Corner) sebagai salah satu sumber dan bacaan belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan karakter generasi berencana. Prinsip Dasar dari Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) antara lain :

1. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini juga merupakan strategi dalam memberikan informasi manfaat dan dampak akan kependudukan melalui integrasi mata pelajaran, kegiatan kesiswaan, bimbingan konseling dan kegiatan yang relevan lainnya.
2. Sekolah Siaga Kependudukan, mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan dan bukan merupakan mata pelajaran baru, sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Namun dengan adanya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ini diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas, atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sekolah Siaga Kependudukan, konsisten dilaksanakan selama mata pelajaran tersebut dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum.

VIII. Tujuan

Maksud dan tujuan Fasilitasi dan Pembinaan teknis Sekolah Siaga Kependudukan adalah sebagai berikut:

2. Siswa/Siswi dan Guru di lingkungan Sekolah memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan.
2. Siswa/Siswi dan Guru di lingkungan Sekolah memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat.
3. Siswa/Siswi dan Guru di lingkungan Sekolah mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik atau digital untuk dianalisa sederhana.
4. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan.

IX. Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Sekolah Siaga Kependudukan akan dilaksanakan di dua (2) Sekolah yang ada di Kota Palangka Raya pada Tahun 2025 .

X. Peserta Kegiatan

Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Sekolah Siaga Kependudukan diikuti oleh peserta sebagai berikut :

No.	Peserta	Jumlah
1.	Kepala Sekolah / Wakasek	4 Orang
2.	Guru di lingkungan sekolah	24 Orang
3.	Siswa/Siswi di lingkungan sekolah	74 Orang
4.	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	4 Orang
5.	PD Dalduk KB Kota Palangka Raya	14 Orang
Jumlah		120 Orang

XI. Pembiayaan

Segala pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal dilaksanakan dengan biaya APBD Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2025.

XII. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar/ panduan pelaksanaan Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Tahun 2025 tingkat Kota Palangka Raya

Palangka Raya, 9 Juli 2024

Analisis Kebijakan,

AGUSTONI M. NGUTUS , SE